

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah (Gambaran Umum)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, inflasi di Kabupaten Berau dipengaruhi terutama oleh faktor musiman akhir tahun, khususnya meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Tekanan inflasi bersifat terkendali namun cenderung meningkat secara musiman, sejalan dengan pola historis inflasi pada triwulan akhir.

Upaya pengendalian inflasi oleh TPID berperan dalam menahan potensi lonjakan harga yang lebih tinggi, sehingga perkembangan inflasi tetap berada dalam kondisi yang relatif stabil meskipun menghadapi tekanan permintaan.

2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapakting)

a. Bahan Pangan Pokok

Harga bahan pangan pokok pada Triwulan IV 2025 menunjukkan kenaikan terbatas pada komoditas tertentu, terutama:

- Beras (dipengaruhi pasokan luar daerah dan biaya distribusi);
- Cabai merah dan cabai rawit (dipengaruhi cuaca dan volatilitas pasokan);
- Bawang merah dan bawang putih.

Kenaikan harga bersifat fluktuatif dan tidak merata, dengan disparitas antar wilayah kecamatan yang masih terlihat.

b. Minyak Goreng, Gula, dan Komoditas Strategis Lain

Harga minyak goreng dan gula pasir relatif lebih stabil, meskipun tetap menghadapi tekanan dari sisi distribusi dan permintaan akhir tahun.

Stabilisasi harga didukung oleh:

- Ketersediaan stok yang relatif mencukupi;
- Intervensi pasar secara selektif oleh pemerintah daerah.

c. LPG dan Energi Tertentu

Harga LPG bersubsidi relatif terkendali, namun terdapat potensi tekanan distribusi di wilayah tertentu akibat peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas usaha pada akhir tahun.

3. Perkembangan Harga Barang Lainnya

Kelompok barang lainnya pada Triwulan IV 2025 menunjukkan:

- Kenaikan harga pada barang konsumsi non-pangan terkait perayaan akhir tahun;
- Relatif stabilnya harga barang tahan lama;
- Kenaikan terbatas pada barang tertentu yang bergantung pada pasokan luar daerah.

Tekanan harga pada kelompok ini tidak menjadi kontributor utama inflasi, namun tetap memengaruhi persepsi inflasi masyarakat.

4. Perkembangan Harga Jasa

Harga kelompok jasa pada Triwulan IV 2025 cenderung mengalami peningkatan moderat, terutama pada:

- Jasa transportasi (peningkatan mobilitas akhir tahun);
- Jasa akomodasi dan rekreasi;
- Jasa terkait kegiatan sosial dan pariwisata.

Kenaikan harga jasa bersifat musiman dan temporer, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pada akhir tahun.

5. Risiko Inflasi ke Depan

Beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai ke depan antara lain:

a. Risiko Permintaan

- Lonjakan permintaan lanjutan pada awal tahun akibat sisa konsumsi akhir tahun;

Perubahan pola konsumsi masyarakat.

b. Risiko Pasokan dan Distribusi

- Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah;
- Gangguan distribusi akibat cuaca atau kendala logistik;
- Kenaikan biaya transportasi.

c. Risiko Volatilitas Harga Pangan

- Fluktuasi harga komoditas hortikultura;
- Sensitivitas terhadap cuaca dan musim tanam.

d. Risiko Ekspektasi Inflasi

- Persepsi kenaikan harga yang mendorong penyesuaian harga lebih awal oleh pedagang;
- Potensi perilaku spekulatif pasar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Tekanan Permintaan Musiman Akhir Tahun

Pada Triwulan IV Tahun 2025, pengendalian inflasi di Kabupaten Berau menghadapi peningkatan permintaan masyarakat yang bersifat musiman, khususnya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kondisi ini mendorong:

- Kenaikan permintaan bahan pangan pokok
- Peningkatan konsumsi rumah tangga dan kegiatan sosial
- Tekanan harga pada komoditas tertentu yang pasokannya terbatas.
-

Permasalahan utama: kebijakan pengendalian inflasi harus bekerja lebih keras pada periode dengan lonjakan permintaan yang relatif singkat namun intensif.

2. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, bawang, cabai, dan bahan pangan tertentu lainnya.

Dampaknya:

- Rentan terhadap gangguan pasokan di daerah asal
- Harga mudah terpengaruh kenaikan biaya transportasi dan logistik
- Ruang intervensi pemerintah daerah menjadi terbatas.

Permasalahan struktural: rendahnya kemandirian pasokan pangan lokal.

3. Biaya Logistik dan Tantangan Geografis

Karakteristik geografis Kabupaten Berau menyebabkan:

- Biaya distribusi relatif tinggi
- Waktu tempuh distribusi lebih panjang
- Potensi keterlambatan pasokan ke wilayah tertentu.

Kondisi ini memicu disparitas harga antar kecamatan, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah yang sulit dijangkau.

Permasalahan utama: kelancaran distribusi belum sepenuhnya optimal dan berdampak pada stabilitas harga.

4. Volatilitas Harga Komoditas Pangan Tertentu

Beberapa komoditas pangan menunjukkan volatilitas harga yang tinggi, khususnya:

- Cabai merah dan cabai rawit
- Bawang merah

- Komoditas segar yang sensitif terhadap cuaca dan distribusi.

Faktor cuaca dan keterbatasan pasokan cepat memicu fluktuasi harga, sementara intervensi membutuhkan waktu dan biaya.

Permasalahan utama: respon kebijakan sering bersifat reaktif terhadap komoditas yang bergejolak.

5. Keterbatasan Anggaran Intervensi Harga

Pelaksanaan operasi pasar, subsidi distribusi, dan program stabilisasi harga menghadapi:

- Keterbatasan alokasi anggaran daerah
- Prioritas belanja daerah yang harus dibagi dengan program lain
- Skala intervensi yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Permasalahan utama: intervensi harga belum dapat dilakukan secara luas dan berkelanjutan.

6. Integrasi dan Kecepatan Data Harga yang Belum Optimal

Meskipun pemantauan harga telah dilakukan secara rutin, masih terdapat kendala berupa:

- Perbedaan waktu pembaruan data antar OPD
- Keterbatasan data real-time di wilayah terpencil
- Pemanfaatan data yang belum sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar kebijakan cepat.

Permasalahan utama: keterlambatan deteksi dini potensi lonjakan harga.

7. Perilaku Pasar dan Ekspektasi Inflasi

Pada periode akhir tahun, perilaku pasar cenderung menunjukkan:

- Kecenderungan penimbunan stok oleh pedagang tertentu

- Ekspektasi kenaikan harga yang mendorong kenaikan harga lebih awal
- Potensi panic buying di tingkat konsumen.

Permasalahan utama: pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya efektif.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Koordinasi TPID

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan pengendalian inflasi dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal.

Koordinasi dilakukan melalui:

- Rapat koordinasi rutin TPID untuk memantau perkembangan harga dan pasokan
- High Level Meeting (HLM) TPID menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Fokus utama koordinasi adalah antisipasi peningkatan permintaan masyarakat di akhir tahun serta mitigasi risiko gangguan pasokan dan distribusi.

2. Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan

Selama Triwulan IV 2025, TPID Kabupaten Berau secara konsisten melaksanakan:

- Pemantauan harga harian dan mingguan komoditas strategis
- Monitoring ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di pasar dan distributor
- Koordinasi dengan BPS, Bulog, dan pelaku usaha untuk memperoleh data dan informasi terkini.

Komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi:

- Beras

Cabai merah dan cabai rawit

- Bawang merah dan bawang putih
- Minyak goreng
- Gula pasir
- LPG dan BBM tertentu

3. Upaya Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi

Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Kabupaten Berau pada Triwulan IV 2025 melaksanakan langkah-langkah:

- Pengamanan pasokan pangan melalui koordinasi dengan daerah pemasok
- Pengawasan distribusi guna mencegah keterlambatan pasokan dan praktik penimbunan
- Optimalisasi peran distributor dan pedagang besar agar pasokan tetap lancar hingga ke tingkat pasar.

Upaya ini penting mengingat karakteristik Kabupaten Berau yang memiliki ketergantungan pasokan dari luar daerah dan biaya logistik yang relatif tinggi.

4. Operasi Pasar dan Intervensi Harga (Bila Diperlukan)

Sebagai langkah antisipatif, TPID menyiapkan dan melaksanakan:

- Operasi pasar murah atau gerakan pangan murah secara selektif
- Intervensi harga pada komoditas yang mengalami tekanan signifikan
- Sinergi dengan Bulog dan perangkat daerah terkait dalam penyediaan komoditas bersubsidi.

Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya menjelang puncak konsumsi akhir tahun.

◦

5. Komunikasi Efektif dan Edukasi Masyarakat

TPID Kabupaten Berau juga memperkuat aspek komunikasi kebijakan melalui:

- Penyampaian informasi perkembangan harga kepada masyarakat
- Imbauan belanja bijak dan tidak melakukan panic buying
- Mendorong pemanfaatan produk pangan lokal untuk mengurangi tekanan permintaan.

Langkah komunikasi ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi agar ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga.

6. Evaluasi dan Pelaporan

Pada akhir Triwulan IV 2025, TPID Kabupaten Berau melakukan:

- Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi
- Penyusunan laporan perkembangan inflasi dan tindak lanjut kebijakan
- Penyiapan rekomendasi strategis untuk pengendalian inflasi awal Tahun 2026.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Umum

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau dilaksanakan melalui pendekatan koordinatif, preventif, dan responsif, dengan fokus pada pengamanan pasokan dan stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal 2025 dan Tahun Baru 2026).

Secara umum, kebijakan yang ditempuh telah berjalan sesuai dengan rencana TPID, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan musiman.

2. Evaluasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan

a. Perencanaan dan Koordinasi

- Koordinasi TPID melalui rapat rutin dan High Level Meeting telah meningkatkan kesamaan persepsi antar perangkat daerah.

- Isu strategis seperti kenaikan permintaan akhir tahun dan potensi gangguan distribusi telah diantisipasi sejak awal triwulan.
- Namun, sinkronisasi data harga dan pasokan antar OPD masih perlu ditingkatkan agar respons kebijakan lebih cepat dan tepat sasaran.

Penilaian: Baik, namun perlu penguatan integrasi data.

b. Pemantauan Harga dan Pasokan

- Pemantauan harga komoditas strategis telah dilakukan secara berkala.
- Informasi harga menjadi dasar penentuan intervensi kebijakan.
- Tantangan muncul pada keterbatasan jangkauan pemantauan di wilayah terpencil, sehingga potensi disparitas harga belum sepenuhnya terdeteksi dini.

Penilaian: Cukup efektif, perlu perluasan cakupan pemantauan.

c. Kebijakan Pengamanan Pasokan dan Distribusi

- Koordinasi dengan daerah pemasok dan distributor relatif efektif dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.
- Kelancaran distribusi masih dipengaruhi oleh faktor geografis dan biaya logistik yang tinggi.
- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi kelemahan struktural dalam pengendalian inflasi Berau.

Penilaian: Efektif secara jangka pendek, belum optimal secara struktural.

d. Intervensi Pasar

- Operasi pasar dan gerakan pangan murah dilakukan secara selektif dan situasional.
- Intervensi membantu menahan lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Namun, cakupan dan frekuensi intervensi masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan distribusi.

Penilaian: Tepat sasaran, namun terbatas dari sisi skala.

e. Komunikasi dan Pengendalian Ekspektasi

- Informasi harga dan imbauan kepada masyarakat telah disampaikan melalui berbagai kanal.
- Upaya pengendalian ekspektasi inflasi cukup membantu mencegah panic buying.
- Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih berdampak.

Penilaian: Baik, perlu penguatan literasi dan partisipasi publik.

3. Evaluasi Dampak Kebijakan

- Kebijakan TPID Triwulan IV 2025 berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan permintaan akhir tahun.
- Tidak terjadi gejolak harga yang bersifat ekstrem atau berkepanjangan.
- Meski demikian, disparitas harga antar wilayah dan volatilitas komoditas pangan tertentu masih menjadi catatan penting.

4. Permasalahan dan Kendala Utama

1. Ketergantungan pasokan dari luar daerah
 2. Biaya logistik yang relatif tinggi
 3. Keterbatasan anggaran intervensi harga
 4. Disparitas harga antar kecamatan
 5. Integrasi dan kecepatan data harga yang belum optimal
-

5. Pembelajaran (Lesson Learned)

- Pengendalian inflasi lebih efektif ketika antisipasi dilakukan sejak awal triwulan, bukan saat harga sudah meningkat.
- Koordinasi TPID yang kuat mampu menekan dampak musiman, namun kebijakan struktural jangka panjang tetap dibutuhkan.
- Intervensi pasar perlu dikombinasikan dengan penguatan produksi dan distribusi lokal.

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah.
 2. Peningkatan sistem pemantauan harga berbasis digital hingga ke wilayah terpencil.
 3. Perluasan cakupan dan frekuensi operasi pasar pada periode berisiko tinggi inflasi.
 4. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengamanan pasokan pangan.
 5. Peningkatan anggaran dan fleksibilitas kebijakan TPID dalam merespons tekanan harga.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan

1. Pengamanan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula) melalui kerja sama antar daerah pemasok, khususnya menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
2. Peningkatan peran Bulog dan BUMD Pangan dalam menjaga stok cadangan daerah.
3. Penguatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana produksi,

pendampingan petani, dan optimalisasi lahan pangan untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah.

2. Menjaga Keterjangkauan Harga

1. Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah secara terjadwal dan tepat sasaran pada wilayah dengan tekanan harga tinggi.
2. Subsidi biaya distribusi terbatas untuk komoditas strategis guna menahan lonjakan harga akibat tingginya biaya logistik.
3. Penguatan pengawasan harga di tingkat pedagang untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.

3. Peningkatan Kelancaran Distribusi

1. Optimalisasi jalur distribusi pangan dengan memperkuat koordinasi bersama distributor dan pelaku usaha logistik.
2. Pemetaan wilayah rawan disparitas harga sebagai dasar intervensi distribusi yang lebih cepat.
3. Fasilitasi transportasi pangan ke wilayah terpencil guna mengurangi kesenjangan harga antar kecamatan.

4. Penguatan Sistem Pemantauan dan Data

1. Pengembangan sistem pemantauan harga terpadu berbasis digital dan real-time hingga tingkat kecamatan.
2. Sinkronisasi data harga dan stok antar OPD, BPS, dan Bank Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan cepat.
3. Pemanfaatan early warning system inflasi untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih dini.

5. Pengendalian Ekspektasi dan Komunikasi Publik

Peningkatan komunikasi kebijakan TPID kepada masyarakat terkait kondisi pasokan dan harga.

2. Edukasi belanja bijak dan anti panic buying, khususnya menjelang akhir tahun.
3. Pelibatan pelaku usaha dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

6. Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan TPID

1. Peningkatan kapasitas SDM TPID melalui pelatihan dan asistensi teknis.
2. Penguatan dukungan anggaran pengendalian inflasi agar intervensi pasar dapat dilakukan lebih luas dan berkelanjutan.
3. Penyusunan rencana aksi inflasi berbasis risiko khusus untuk periode Triwulan IV.